

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam dinamika politik global kontemporer, interaksi global kerap diwujudkan melalui kerja sama ekonomi, yang berkembang dari perdagangan menuju investasi terintegrasi pada arus investasi asing langsung (*foreign direct investment*/FDI).¹ Bagi negara berkembang, FDI tidak hanya menjadi sumber pembiayaan pembangunan, tetapi juga sarana memperoleh transfer teknologi, peningkatan kapasitas industri, dan integrasi ke dalam rantai nilai global. Dinamika ini terlihat jelas dalam perebutan akses terhadap mineral kritis, yang belakangan menjadi salah satu isu paling diperebutkan seiring transisi energi global menuju kendaraan listrik. Nikel merupakan bahan baku utama dalam produksi baterai *electric vehicle* (EV), sehingga keberadaannya memiliki nilai strategis dalam rantai pasok industri global.

Amerika Serikat dan Tiongkok, sebagai dua kekuatan besar yang bersaing dalam penguasaan teknologi dan rantai pasok EV, masing-masing memperluas pengaruh melalui skema kebijakan berbeda. Kondisi ini menempatkan negara pemilik sumber daya mineral kritis, termasuk Indonesia, pada posisi strategis sekaligus dilematis dalam menentukan arah kerja sama ekonomi dan investasinya. Indonesia terletak pada posisi sentral dengan memiliki cadangan sekitar 52% dari total cadangan nikel dunia sekitar 139.419.000 ton.² Besarnya cadangan ini

¹Afidatuzzakiah, "Interaksi Investasi Asing Langsung, Dinamika Pasar Tenaga Kerja, dan Keberlanjutan Lingkungan Dalam Membentuk Ketahanan Ekonomi Pasar Berkembang," *Jurnal Ilmu Ekonomi, Pendidikan dan Teknik*, Jurnal Identik, Vol. 02 (September 2025).

² Alfandy Oliver R and Andi Meganingratna, "Dilema Hijau: Analisis Pengaruh Investasi Smelter Nikel China Di Sulawesi Tenggara Terhadap Komitmen Sustainable Development Goals

menjadikan Indonesia memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang signifikan dalam rantai pasok mineral kritis global.

Sebagai *middle power*, Indonesia sebenarnya punya pilihan untuk memihak salah satu kekuatan besar atau merangkul banyak mitra sekaligus agar tidak terlalu bergantung pada satu pihak.³ Pilihan kedua inilah yang dalam studi Hubungan Internasional disebut strategi *hedging*, yaitu upaya negara mengurangi risiko dengan menjalankan beberapa kebijakan yang saling mengimbangi di tengah ketidakpastian. Sebagai langkah awal menjalankan strategi ini, Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan hilirisasi melalui pelarangan ekspor bijih nikel mentah berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 11 Tahun 2019, yang diberlakukan sejak Januari 2020, dengan tujuan mendorong pembangunan industri pemurnian dan pengolahan (*smelter*) di dalam negeri.⁴ Namun, implementasi hilirisasi memerlukan investasi besar, penguasaan teknologi pengolahan, serta pembangunan infrastruktur industri yang belum sepenuhnya dapat dipenuhi oleh kapasitas domestik, sehingga membuka ruang bagi investasi asing untuk menjadi instrumen penting dalam mempercepat prosesnya.

Dalam praktiknya, Pemerintah Indonesia mengoptimalkan diplomasi ekonomi untuk menarik FDI dari berbagai mitra sekaligus.⁵ FDI dari Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, maupun Australia, mempercepat pembangunan kawasan industri nikel di Sulawesi dan Maluku. Pola diversifikasi mitra semacam ini sejalan

Lingkungan Indonesia,” *Dinamika Governance Jurnal Ilmu Administrasi Negara* <http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/index> JDG Vol. 14 (2025): 473–82.

³ Moch Faisal Karim, "Middle Power, Status-Seeking and Role Conceptions: The Cases of Indonesia and South Korea," *Australian Journal of International Affairs* 72, no. 4 (2018): 343–363.

⁴ Dicky Dwi Radhica, "Proteksionisme Nikel Indonesia dalam Perdagangan Dunia," *Cendekia Niaga* 7, no. 1 (August 2023): 74–84, <https://doi.org/10.52391/jcn.v7i1.821>.

⁵ Anindita, Simanjuntak, and Seba, "Diplomasi Ekonomi Indonesia Dalam Meningkatkan Hilirisasi Industri Nikel Pasca Larangan Ekspor Bijih Nikel (2020-2024)."

dengan logika *hedging* pada *middle power*, yaitu tidak menaruh semua kepentingan pada satu kekuatan besar. Meski demikian, dalam praktiknya kerja sama dengan Tiongkok tumbuh paling menonjol dibanding mitra lain. Kerja sama ini terwujud lewat skema penanaman modal asing (PMA) berbentuk *joint venture*, seperti Tsingshan Holding Group dengan Bintang Delapan Group yang membentuk Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), atau Tsingshan bersama Huayou Group dan Zhenshi Group yang membentuk Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), yang keduanya terkait dengan kerangka kerja sama BRI antara Pemerintah Indonesia dan Tiongkok.⁶ Langkah ini merupakan kalkulasi pemerintah yang untuk mempercepat transformasi industri meski tersimpan risiko ketergantungan pada modal dan teknologi asing.⁷

Secara umum, upaya ini menunjukkan hasil yang signifikan, tercermin dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat nilai ekspor nikel Indonesia naik dari USD 1,3 miliar pada tahun 2021 menjadi USD 8 miliar pada tahun 2024.⁸ Namun, di balik capaian itu terdapat tantangan serius mengenai distribusi nilai tambah yang tidak merata, sekitar 90 persen keuntungan masih terkonsentrasi pada investor besar sementara kontribusi langsung bagi masyarakat lokal masih relatif terbatas.⁹ Ekspansi industri nikel juga membawa konsekuensi negatif berupa

⁶ alvinacamba, "Indonesia Morowali Industrial Park: How Industrial Policy Reshapes Chinese Investment and Corporate Alliances," *PPDC Archive*, January 17, 2021, <https://pandapawdragonclaw.blog/2021/01/17/indonesia-morowali-industrial-park-how-industrial-policy-reshapes-chinese-investment-and-corporate-alliances/>.

⁷ Helga Yohana Simatupang and Diah Ayu Wulandari, "Dampak Investasi Nikel China Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Pembangunan Berkelanjutan dan Ekonomi Politik Hijau," *Global and Policy Journal of International Relations* 12, no. 02 (November 2024), <https://doi.org/10.33005/jgp.v12i02.4892>.

⁸ Indonesia BPS, "Analisis Komoditas Ekspor, 2020-2024, Sektor Pertanian, Industri, dan Pertambangan," 06100.25029 - Badan Pusat Statistik 15 (Agustus 2025), <https://www.bps.go.id/id/publication/2025/08/07/60d9e9fbe50bcd95323977ba/analisis-komoditas-ekspor--2020-2024--sektor-pertanian--industri--dan-pertambangan.html>.

⁹ Muhammad Yon Adlan Al-Hakim, Muhammad Nur Habibi, and Achmad Room Fitrianto, "Transformasi Ekonomi Berbasis Nilai Tambah: Analisis Hilirisasi Komoditas Nikel Terhadap

deforestasi mencapai 18 ribu hektar per tahun dan pencemaran air akibat limbah tailing yang mengganggu dampak sosial ekonomi masyarakat sekitar di wilayah pertambangan.¹⁰ Persoalan ini menunjukkan bahwa keberhasilan hilirisasi dari sisi angka ekspor belum sepenuhnya diikuti oleh pemerataan manfaat dan keberlanjutan lingkungan.

Di antara berbagai mitra investasi, Tiongkok tetap menjadi yang paling dominan, dengan penguasaan teknologi pengolahan nikel yang beroperasi di berbagai kawasan industri nasional serta realisasi investasi yang tercatat menyentuh Rp1,7 triliun pada 2024.¹¹ Nilai ekspor yang meningkat 26,5 persen pada 2024 menjadikannya mitra paling responsif dalam mendukung implementasi hilirisasi.¹² Namun, dominasi sebesar ini menyimpang dari logika hedging yang idealnya dijalankan sebuah *middle power*, yang semestinya menjaga jarak relatif seimbang dari semua kekuatan besar, bukan bertumpu pada satu mitra saja.

Pilihan Indonesia sebenarnya tidak terbatas pada negara Tiongkok, Korea Selatan menunjukkan komitmennya melalui investasi pada industri kendaraan listrik senilai USD 4,46 miliar.¹³ Australia juga mencatatkan rekor investasi mencapai Rp.11,09 triliun dengan aliran modal terbesar pada sektor pertambangan Rp. 4,85 triliun.¹⁴ Ketersediaan alternatif ini memunculkan pertanyaan mendasar,

Keberlanjutan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia,” *Indonesian Journal for Entrepreneurial Review*, January 21, 2026, file:///C:/Users/Ideapad%20Slim%201/Downloads/Jurnal+IJER.pdf.

¹⁰ Andi Rahmana Saputra et al., “Dilema Halmahera Di Tengah Industri Nikel,” *Perkumpulan Aksi Ekologi Dan Emansipasi Rakyat (AEER)*, July 2023, <http://aeer.or.id>.

¹¹ Fithrotul Uyun, “Nilai Ekspor Nikel Melonjak Usai Hilirisasi, Tembus US\$34 Miliar,” *Media Nikel Indonesia*, Oktober 2025.

¹² Simatupang and Wulandari, “Dampak Investasi Nikel China Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Pembangunan Berkelanjutan dan Ekonomi Politik Hijau.”

¹³ “Investasi Korea Selatan Di Indonesia Periode 2019-2023, Tembus US\$ 13,9 Miliar,” *BRIEF.ID*, July 4, 2024, <https://brief.id/investasi-korea-selatan-di-indonesia-periode-2019-2023-tembus-us-139-miliar/>.

¹⁴ Adi Ahdiat, “Investasi Australia ke Indonesia Meningkat pada 2024, Cetak Rekor Baru,” *databoks*, June 12, 2025, <https://databoks.katadata.co.id/ekonomi->

jika Indonesia sebagai *middle power* punya begitu banyak alternatif mitra untuk menjalankan hedging secara seimbang, mengapa kebijakan luar negerinya justru tetap condong dominan ke satu negara saja. Ini menjadi sebuah kondisi kekhawatiran mengenai ketergantungan ekonomi dan teknologi, sebagaimana pernah terjadi pada pengalaman Republik Demokratik Kongo dalam skema kerja sama *resources for infrastructure*.¹⁵

Kondisi ini menunjukkan kesenjangan: meski Indonesia sebagai *middle power* memiliki banyak alternatif mitra untuk menjalankan hedging secara seimbang, kebijakan luar negerinya justru tetap condong dominan ke Tiongkok. Hal ini menunjukkan bahwa dominasi investasi Tiongkok tidak bisa dijelaskan semata dari kebutuhan ekonomi, melainkan juga oleh bagaimana atribut-atribut nasional Indonesia membentuk kalkulasi kebijakan luar negerinya. Penelitian sebelumnya telah banyak membahas hilirisasi nikel dan investasi asing, namun analisis mengenai faktor atribut nasional di balik anomali ini masih jarang dilakukan. Karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis faktor atribut nasional yang memengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia dalam menerima investasi Tiongkok pada sektor hilirisasi nikel periode 2020–2024.

1.2 Rumusan Masalah

Kebijakan hilirisasi nikel Indonesia membutuhkan investasi asing dalam jumlah besar untuk mendukung pembangunan industri pengolahan dan penguatan rantai pasok kendaraan listrik di tengah persaingan global memperebutkan mineral

makro/statistik/684a8f2377a8d/investasi-australia-ke-indonesia-meningkat-pada-2024-cetak-rekor-baru.

¹⁵ Christian-Géraud Neema Byamungu, “Blue Metal Blues: Cobalt, the Democratic Republic of Congo, and China,” *South African Institute of International Affairs*, African perspectives Global insights, May 2022, 15.

kritis. Dalam implementasinya, Tiongkok menjadi investor yang paling dominan dibandingkan negara mitra lainnya, meskipun Indonesia sebagai middle power juga memperoleh komitmen investasi dari Korea Selatan, Jepang, dan Australia yang semestinya memungkinkan penerapan strategi hedging secara lebih seimbang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki alternatif sumber investasi untuk menyeimbangkan hubungannya dengan berbagai kekuatan besar, namun investasi Tiongkok tetap menjadi yang paling dominan dalam mendukung pengembangan industri hilirisasi nikel, sekaligus memunculkan berbagai perhatian mengenai potensi ketergantungan ekonomi, penguasaan teknologi, dan keberlanjutan lingkungan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa dominasi investasi Tiongkok tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan pembangunan ekonomi nasional, tetapi juga menyimpang dari logika hedging yang idealnya dijalankan sebuah middle power, sehingga mencerminkan adanya pertimbangan strategis lain di balik kalkulasi kebijakan luar negeri Indonesia dalam membangun kerja sama ekonomi dengan Tiongkok. Oleh karena itu, keputusan Pemerintah Indonesia dalam menerima investasi Tiongkok pada sektor hilirisasi nikel berdasarkan atribut nasional dapat dianalisis dalam perspektif kebijakan luar negeri yang memanfaatkan diplomasi ekonomi sebagai salah satu instrumen untuk mendukung pencapaian kepentingan nasional.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan dari penelitian ini adalah “apa faktor atribut nasional yang memengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia dalam menerima investasi dari Tiongkok pada sektor hilirisasi nikel?”.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan faktor atribut nasional yang memengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia dalam menerima investasi dari Tiongkok pada sektor hilirisasi nikel.

1.5 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat diantaranya :

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Hubungan Internasional, khususnya pada studi kebijakan luar negeri dan diplomasi ekonomi. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai faktor yang dapat memengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara dalam menjalin kerja sama investasi asing untuk mendukung pencapaian kepentingan nasional, khususnya pada sektor hilirisasi nikel sebagai bagian dari pengembangan industri strategis.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi kementerian dan lembaga yang berperan dalam perumusan kebijakan luar negeri, diplomasi ekonomi, serta kebijakan investasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai faktor atribut nasional yang dapat memengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia dalam menerima investasi Tiongkok pada sektor hilirisasi nikel, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dan pengembangan kerja sama investasi pada sektor strategis di masa mendatang.

1.6 Studi Pustaka

Dalam menjawab pertanyaan penelitian, peneliti merujuk pada lima studi pustaka yang dianggap relevan dan mampu memberikan perspektif yang berbeda terkait masalah yang di bahas ataupun penggunaan kerangka konseptual oleh peneliti.

Pertama, peneliti merujuk pada artikel jurnal berjudul “Transformasi Ekonomi: Menggali Potensi Investasi Tiongkok di Smelter Nikel Indonesia” ditulis oleh Virginia Ahtali Grasia, Viona Laurentia Setiawan, dan Sevinka Andrea Tjandra yang diterbitkan pada *Parahyangan Economic Development Review* (PEDR) tahun 2024.¹⁶ Dalam artikel ini, para penulis berargumen bahwa tingginya keterlibatan Tiongkok dalam investasi smelter nikel di Indonesia pasca-2020 merupakan bentuk respons strategis terhadap kebijakan hilirisasi guna mengamankan pasokan rantai nilai global. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *world system theory* untuk menjelaskan hubungan struktural antara negara penyedia modal (*core*) dan penyedia bahan baku (*periphery*). Temuan utama studi ini menunjukkan bahwa investasi Tiongkok memberikan dampak positif terhadap percepatan hilirisasi melalui transfer teknologi pengolahan smelter yang efisien, sehingga mampu mengubah struktur ekonomi nasional. Namun, kelemahan dari penelitian Grasia et al. terletak pada fokusnya yang terlalu bertumpu pada struktur makro sistem dunia, sehingga mengabaikan bagaimana dinamika dan pertimbangan internal di tingkat negara (*state-level*) membentuk pilihan kebijakan pemerintah untuk menerima investasi

¹⁶ Virginia Ahtali Grasia, Sevinka Andrea Tjandra, and Viona Laurentia Setiawan, “Transformasi Ekonomi: Menggali Potensi Investasi Tiongkok di Smelter Nikel Indonesia,” *PARAHYANGAN ECONOMIC DEVELOPMENT REVIEW* 3, no. 1 (February 2025): 247–57, <https://doi.org/10.26593/pedr.v3i1.7507>.

tersebut. Hubungannya dengan penelitian ini adalah, artikel tersebut menjadi rujukan utama peneliti untuk memahami alasan teknis kebutuhan smelter, sementara penelitian peneliti mengisi celah tersebut dengan menggeser fokus dari struktur sistem dunia ke atribut internal Indonesia (*national attributes*) yang menjadi faktor penentu keputusan luar negeri pemerintah.

Artikel ini menjelaskan bahwa investasi Tiongkok memberikan dampak positif terhadap percepatan hilirisasi melalui transfer teknologi pengolahan. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun terdapat risiko ketergantungan teknis, kebutuhan akan inovasi teknologi *smelter* yang efisien menjadi faktor penentu dalam penerimaan investasi tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa langkah pemerintah mendukung masuknya investasi *smelter* adalah strategi yang tepat untuk mengubah struktur ekonomi nasional. Peneliti menjadikan artikel ini sebagai rujukan utama untuk mengidentifikasi bahwa kebutuhan akan percepatan teknologi dan infrastruktur *smelter* menjadi alasan teknis bagi Pemerintah Indonesia dalam memprioritaskan investasi dari Tiongkok.

Artikel kedua merujuk kepada artikel jurnal dengan judul “Dampak Kerja Sama Indonesia-China dalam Proyek Investasi Nikel Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kedua Negara” yang ditulis oleh Putri Zahra Fauziyyah dan Arie Kusuma Paksi dalam *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* tahun 2023.¹⁷ Penulis berargumen bahwa kolaborasi investasi smelter menciptakan hubungan saling ketergantungan yang menguntungkan (*symbiotic mutualism*) bagi pertumbuhan ekonomi kedua negara. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan

¹⁷ Putri Zahra Fauziyyah and Arie Kusuma Paksi, “Dampak Kerjasama Indonesia-China Dalam Proyek Investasi Nikel Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kedua Negara,” *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 7, no. 1 (February 2023): 86–105, <https://doi.org/10.38043/jids.v7i1.4279>.

pendekatan teori interdependensi liberal. Temuan penelitian ini merujuk pada lonjakan pendapatan negara dan ekspor yang signifikan pasca-pelarangan ekspor bijih nikel yang didorong oleh pembangunan smelter Tiongkok, di mana Indonesia memperoleh modal dan Tiongkok mendapatkan kepastian pasokan bahan baku. Kelemahan penelitian ini adalah kecenderungannya yang terlalu optimis dengan mengasumsikan bahwa kebijakan luar negeri didorong murni oleh kalkulasi efisiensi ekonomi pasar, tanpa mempertimbangkan peran regulasi proteksionis (*resource nationalism*) serta dinamika sistem politik dalam negeri. Hubungannya dengan penelitian ini, artikel Fauziyyah & Paksi membantu peneliti memahami faktor interdependensi ekonomi, namun peneliti mengkritik asumsi interdependensi murni tersebut dengan menguji variabel *Political System* dan *Economic Capabilities* untuk memperlihatkan bahwa penerimaan investasi Tiongkok juga dibentuk oleh intervensi kebijakan dan ketimpangan modal domestik.

Artikel ini menjelaskan bahwa kerja sama tersebut menciptakan simbiosis mutualisme di mana Indonesia memperoleh modal untuk hilirisasi, sedangkan Tiongkok mendapatkan kepastian pasokan bahan baku nikel. Penemuan penelitian ini merujuk pada lonjakan pendapatan negara yang signifikan pasca pelarangan ekspor bijih nikel yang didorong oleh pembangunan *smelter* Tiongkok. Penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor pertumbuhan ekonomi menjadi pendorong utama bagi Indonesia untuk tetap mempertahankan kemitraan investasi dengan Tiongkok. Peneliti menjadikan artikel ini sebagai rujukan untuk memahami faktor interdependensi ekonomi sebagai alasan fundamental pemerintah dalam mempertahankan investasi.

Artikel ketiga yang peneliti gunakan merupakan artikel jurnal yang ditulis oleh Farah Rosada, Raden Ambara Arya Wibisana, dan Arie Kusuma Paksi dengan judul “*The Impact of Indonesia-China Nickel Cooperations on Indonesia’s Economy and Environment*” yang diterbitkan pada tahun 2023 dalam *Nation State: Journal of International Studies*.¹⁸ Penulis berargumen bahwa kerja sama bilateral industri nikel merupakan manifestasi kepentingan nasional yang saling melengkapi, namun memicu dilema antara pertumbuhan ekonomi dan tantangan lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif eksplanatif dengan pisau analisis diplomasi ekonomi. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa keunggulan Tiongkok dalam penguasaan teknologi pengolahan nikel dan kecepatan realisasi investasinya menjadikan Tiongkok sebagai mitra yang sulit tergantikan, meskipun membawa konsekuensi negatif berupa degradasi lingkungan dan tantangan limbah tailing. Kelemahan studi ini adalah hanya berfokus pada evaluasi luaran (*outcomes*) dan dampak diplomasi ekonomi, tetapi belum membedah faktor-faktor penjelas (*explanans*) internal yang melatarbelakangi mengapa instrumen diplomasi ekonomi tersebut diarahkan secara dominan kepada Tiongkok. Keterkaitannya dengan penelitian ini, karya Rosada et al. memperkuat argumentasi peneliti mengenai efisiensi teknologi Tiongkok, sementara penelitian peneliti melengkapi celah tersebut dengan meneliti variabel penyebab (*explanans*) yaitu atribut nasional Indonesia sebelum diplomasi ekonomi tersebut dieksekusi. Dijelaskan dalam artikel bahwa investasi Tiongkok memberikan dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama dalam penciptaan lapangan kerja dan pembangunan

¹⁸ Farah Rosada, Raden Ambara Arya Wibisana, and Arie Kusuma Paksi, “The Impact of Indonesia-China Nickel Cooperations on Indonesia’s Economy and Environment,” *Nation State: Journal of International Studies* 6, no. 2 (December 2023): 96–116, <https://doi.org/10.24076/nsjis.v6i2.1270>.

infrastruktur di area industri nikel. Penemuan dari penelitian ini adalah keunggulan Tiongkok dalam penguasaan teknologi pengolahan nikel dan kecepatan realisasi investasinya menjadikan Tiongkok sebagai mitra yang sulit tergantikan. Meski demikian, penelitian ini juga memperhatikan adanya konsekuensi negatif yang berkaitan dengan degradasi lingkungan dan tantangan pengelolaan limbah. Artikel ini dapat dijadikan rujukan peneliti untuk memperkuat argumentasi mengenai efisiensi teknologi, kesiapan modal dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur merupakan alasan Pemerintah Indonesia dalam menerima investasi Tiongkok untuk hilirisasi mineral nasional.

Pada artikel jurnal keempat dengan judul “*Indonesia, Nickel, and the Political Economy of Polyalignment in the Second Cold War*” ditulis oleh Trissia Wijaya dan Lee Jones dan diterbitkan pada 26 Februari 2025 dalam *Third World Quarterly*.¹⁹ Penulis berargumen bahwa meskipun Indonesia secara formal menerapkan kebijakan bebas-aktif dan *hedging*, pada praktiknya Indonesia mengalami ketergantungan mendalam pada Tiongkok yang didorong oleh aliansi antara investor Tiongkok dan oligarki politisi-bisnis lokal. Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan ekonomi politik kritis, memadukan konsep *polyalignment* dan teori Gramscian. Temuan penelitian ini mengungkap bahwa Tiongkok menguasai mayoritas saham smelter dan menyerap 98 persen nilai ekspor nikel Indonesia karena investor Tiongkok lebih toleran terhadap standar lingkungan dan tata kelola yang rendah. Kelemahan dari karya ini terletak pada penekanannya yang sangat kental pada aktor agen/elite dan dinamika kelas, sehingga cenderung

¹⁹ Trissia Wijaya and Lee Jones, “Indonesia, Nickel, and the Political Economy of Polyalignment in the Second Cold War,” *Third World Quarterly*, February 26, 2025, 1–20, <https://doi.org/10.1080/01436597.2025.2465514>.

mengabaikan atribut-atribut struktural objektif negara yang bersifat relatif tetap (*relatively enduring characteristics*). Hubungannya dengan penelitian ini, karya Wijaya & Jones memberikan rujukan bagi peneliti mengenai dinamika sosial-politik domestik, sementara peneliti memperluas cakupan analisisnya dengan menguji atribut struktural negara secara sistematis melalui 7 variabel *National Attributes* Hudson & Day.

Artikel ini menjelaskan bahwa keterlibatan Tiongkok pada sektor hilirisasi nikel Indonesia sangatlah dominan dengan penguasaan mayoritas saham sekitar 40 persen sementara Indonesia hanya memegang 10 persen. Penemuan dari penelitian ini memperlihatkan sekitar 90 persen penyediaan investasi dalam produksi nikel berasal dari Tiongkok dengan menyerap 98 persen nilai ekspor produk berbasis nikel Indonesia pada pertengahan tahun 2023.²⁰ Selain itu, penulis menyatakan bahwa kebijakan nasionalisme sumber daya sering digunakan sebagai retorika konsolidasi kontrol oligarki domestik. Artikel ini menjadi rujukan pemahaman peneliti mengenai dinamika kekuatan sosial politik Indonesia dan dampak negatif yang dihasilkan dari dominasi investasi asing terhadap ketahanan ekonomi nasional Indonesia dalam jangka panjang.

Artikel kelima, peneliti merujuk pada artikel jurnal dengan judul “Turkey’s Reasons to Normalize Diplomatic Relations with Israel in 2021” karya Isyfa Zahrotul Mufidah, Haryo Prasodjo, Najamuddin Khairur Rijal, dan Havidz Ageng Prakoso yang diterbitkan pada tahun 2022 melalui *Journal of Islamic World and*

²⁰ Wijaya and Jones, “Indonesia, Nickel, and the Political Economy of Polyalignment in the Second Cold War.”

Politics.²¹ Penulis berargumen bahwa kebijakan normalisasi Turki merupakan langkah strategis untuk mengamankan kepentingan nasional di tengah ketidakpastian regional. Studi ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan menerapkan teori *Foreign Policy Analysis* (FPA) dari Valerie M. Hudson yang berfokus pada atribut nasional. Temuan penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi, kebutuhan politik regional, dan kapabilitas militer menjadi pendorong utama perubahan kebijakan luar negeri Turki. Kelemahan artikel ini dalam kaitannya dengan studi peneliti adalah penerapannya yang terbatas pada kasus politik-keamanan tradisional di Timur Tengah, sehingga belum menguji efektivitas kerangka atribut nasional pada isu politik ekonomi internasional atau pengelolaan mineral kritis. Hubungan dengan penelitian ini adalah artikel Mufidah et al. memberikan rujukan penting bagi peneliti dalam mengoperasionalkan kerangka analisis *National Attributes* Hudson & Day, di mana peneliti mengambil kerangka konseptual yang sama tetapi mengaplikasikannya pada objek studi baru, yaitu kebijakan luar negeri Indonesia dalam menerima investasi Tiongkok di sektor hilirisasi nikel.

Pada kesimpulannya, artikel ini menunjukkan bahwa terdapat tiga kategori krusial yang melatarbelakangi normalisasi tersebut. Pertama, faktor ekonomi menjadi pendorong utama. Kedua, faktor politik di mana Turki berupaya memperkuat posisinya sebagai kekuatan regional di Timur Tengah. Ketiga, faktor keamanan dan militer, mengingat Israel merupakan mitra strategis dalam penyediaan teknologi pertahanan dan intelijen untuk menghadapi ancaman

²¹ Isyfa Zahrotul Mufidah et al., "Turkey's Reasons to Normalize Diplomatic Relations with Israel in 2021," *Journal of Islamic World and Politics* 6, no. 2 (December 2022): 228–52, <https://doi.org/10.18196/jiwp.v6i2.16304>.

regional. Artikel ini memberikan rujukan penting bagi peneliti dalam memahami bagaimana faktor internal (atribut nasional) dan tekanan eksternal (sistem internasional) saling berinteraksi dalam membentuk keputusan kebijakan luar negeri. Secara khusus, kerangka analisis dalam artikel ini membantu peneliti dalam membedah faktor yang dapat memengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia dalam menerima investasi Tiongkok pada sektor hilirisasi nikel, di mana kebutuhan akan penguasaan teknologi dan peningkatan nilai tambah ekonomi (hilirisasi) menjadi kepentingan nasional yang utama, hal ini dinilai serupa dengan upaya Turki dalam mengamankan posisi geopolitik dan ekonominya melalui kerja sama strategis.

Tabel 1.1 Research Gap

No	Judul	Fokus Utama	Gap	Novelty
1	Transformasi Ekonomi; Menggali Potensi Investasi Tiongkok di Smelter Nikel Indonesia (2024)	Penyebab tingginya investasi Tiongkok pada smelter nikel pasca-2020, memakai World System Theory	Fokus pada hubungan struktural makro (core-periphery), belum membedah faktor internal negara	Menganalisis atribut nasional (national attributes) sebagai penentu keputusan Indonesia, bukan dinamika sistem dunia
2	Dampak Kerja Sama Indonesia-China dalam Proyek Investasi Nikel Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kedua Negara (2023)	Dampak kerja sama smelter nikel terhadap ekonomi kedua negara, memakai teori Interdependensi Liberal	Berasumsi kerja sama terjadi rasional-ekonomis semata, mengabaikan aspek politik luar negeri	Menjelaskan penerimaan investasi Tiongkok sebagai hasil kalkulasi politik luar negeri berbasis atribut nasional
3	<i>The Impact of Indonesia-China Nickel Cooperations on Indonesia's Economy and Environment</i> (2023)	Dampak kerja sama nikel terhadap ekonomi dan lingkungan, memakai pendekatan Diplomasi Ekonomi	Fokus pada evaluasi dampak/luaran, belum menguji variabel penjelas di balik keputusan diplomasi	Menguji variabel penjelas (explanans) domestik yang melatarbelakangi keputusan diplomasi ekonomi
4	<i>Indonesia, Nickel, and the Political Economy of Polyalignment in the Second Cold War</i> (2025)	Dinamika polyalignment dan oligarki politik-bisnis dalam industri nikel, memakai Ekonomi Politik Kritis	Menekankan aktor elite/oligarki, kurang menguji atribut struktural negara yang relatif tetap	Menguji 7 atribut nasional Hudson & Day secara menyeluruh sebagai atribut struktural objektif negara
5	<i>Turkey's Reasons to Normalize Diplomatic Relations with Israel in 2021.</i> (2022)	Alasan normalisasi hubungan Turki-Israel 2021, memakai kerangka National Attributes Hudson	Mengaplikasikan teori pada isu keamanan regional, bukan politik ekonomi internasional/mineral kritis	Mengadopsi kerangka National Attributes Hudson & Day pada diplomasi mineral kritis dan hilirisasi nikel

Sumber: Diolah oleh peneliti

1.7 Kerangka Konseptual

Kebijakan luar negeri merupakan salah satu konsep utama dalam studi Hubungan Internasional yang menjelaskan bagaimana suatu negara mengelola hubungan dengan aktor-aktor di luar batas wilayahnya untuk mencapai kepentingan

nasional. Dalam perkembangannya, *Foreign Policy Analysis* (FPA) memberikan perhatian pada proses dan faktor yang menjelaskan mengapa suatu kebijakan luar negeri diambil. Perkembangan kajian kebijakan luar negeri mengalami kemajuan yang signifikan melalui lahirnya pendekatan ***foreign policy analysis (FPA)***. Pendekatan ini berakar pada pemikiran Richard C. Snyder, H.W. Bruck, dan Burton Sapin mengenai *decision-making*, kemudian dikembangkan oleh James N. Rosenau melalui *pre-theory of foreign policy*, serta Harold dan Margaret Sprout melalui pendekatan *man-milieu relationship*. Ketiga pemikiran tersebut menjadi fondasi perkembangan FPA yang kemudian disistematisasi dan dikembangkan lebih lanjut oleh Valerie M. Hudson dan Benjamin S. Day dalam buku *Foreign Policy Analysis: Classic and Contemporary Theory* sehingga menjadi salah satu pendekatan utama dalam menjelaskan proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri.²²

Berbeda dengan pendekatan tradisional yang cenderung memandang negara sebagai *unitary actor*, *foreign policy analysis* berangkat dari asumsi bahwa negara pada hakikatnya merupakan suatu abstraksi yang tidak memiliki kemampuan bertindak secara mandiri.²³ Menurut Hudson dan Day, tindakan negara dalam hubungan internasional diwujudkan melalui individu maupun kelompok yang memiliki kewenangan sebagai pengambil keputusan.²⁴ Oleh karena itu, kebijakan luar negeri dipahami sebagai hasil dari persepsi, preferensi, pertimbangan, serta kalkulasi para pengambil keputusan, bukan sebagai konsekuensi otomatis dari negara sebagai sebuah *black box*. Tujuan utama *Foreign Policy Analysis* bukan

²² Valerie M. Hudson and Benjamin S. Day, *Foreign Policy Analysis: Classic and Contemporary Theory*, Third edition (Lanham, Maryland Boulder New York London: Rowman & Littlefield, 2020).

²³ Hudson and Day, *Foreign Policy Analysis*.

²⁴ Hudson and Day, *Foreign Policy Analysis*.

sekadar mendeskripsikan kebijakan luar negeri, melainkan menjelaskan mengapa suatu kebijakan diambil melalui hubungan kausal antara *explanandum* dan *explanans*. Dalam penelitian ini, *explanandum* merupakan kebijakan luar negeri Indonesia dalam menerima investasi Tiongkok pada sektor hilirisasi nikel, sedangkan *explanans* merupakan faktor atribut nasional yang memengaruhi lahirnya kebijakan tersebut.

Dalam menjelaskan hubungan antara *explanandum* dan *explanans* tersebut, Hudson dan Day mengemukakan bahwa sumber penjelas (*sources of explanation*) kebijakan luar negeri dapat dianalisis melalui beberapa level, yaitu *the individual decision maker, group decision making, culture and national identity, domestic politics, national attributes, dan international system*.²⁵ Keragaman level analisis tersebut menunjukkan bahwa ruang lingkup kebijakan luar negeri tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu faktor, melainkan merupakan hasil interaksi berbagai faktor yang bekerja pada tingkatan yang berbeda. Oleh karena itu, peneliti perlu memilih level analisis yang paling relevan dengan karakteristik permasalahan yang dikaji agar hubungan sebab-akibat dalam suatu keputusan kebijakan luar negeri dapat dijelaskan secara lebih komprehensif.

Penelitian ini menggunakan *the levels of national attributes* sebagai *source of explanation* dalam kerangka ***foreign policy analysis*** Hudson dan Day. *National attributes* merupakan karakteristik yang melekat pada suatu negara dan membentuk kapasitas sekaligus batasan negara dalam merumuskan kebijakan luar negeri.²⁶ Berbeda dengan level analisis lain yang berfokus pada individu, kelompok

²⁵ Hudson and Day, *Foreign Policy Analysis*.

²⁶ Hudson and Day, *Foreign Policy Analysis*.

pengambil keputusan, atau dinamika politik domestik, *national attributes* menempatkan karakteristik objektif negara sebagai faktor yang memengaruhi bagaimana pemerintah merumuskan pilihan kebijakan luar negeri. Karakteristik tersebut bersifat relatif tetap (*relatively enduring characteristics*) sehingga membentuk peluang, keterbatasan, serta kemampuan negara dalam mencapai kepentingan nasional melalui kebijakan luar negeri. Dengan demikian, *national attributes* memandang bahwa keputusan suatu negara tidak hanya dipengaruhi oleh preferensi para pengambil keputusan, tetapi juga oleh kondisi nasional yang dimiliki negara tersebut.

Hudson dan Day mengelompokkan atribut nasional ke dalam tujuh faktor utama, yaitu sebagai berikut:²⁷

1. *Size*

Size atau ukuran merujuk pada luas wilayah territorial dan jumlah penduduk pada suatu negara. Secara langsung, dapat memengaruhi kapasitas sebuah negara dalam mengelola sumber daya, memproyeksikan pengaruh, serta menentukan posisi tawar (*bargaining position*) dalam hubungan internasional. Negara dengan ukuran wilayah dan populasi yang besar cenderung memiliki basis sumber daya yang lebih luas serta pasar domestik yang lebih besar, sehingga membuka ruang bagi negara tersebut untuk berperan lebih signifikan dalam interaksi ekonomi maupun politik global. Namun, ukuran yang besar juga dapat menimbulkan tantangan tersendiri dalam hal koordinasi

²⁷ Hudson and Day, *Foreign Policy Analysis*.

kebijakan dan pemerataan pembangunan, yang pada gilirannya turut membentuk orientasi kebijakan luar negeri suatu negara.

2. *Geography*

Faktor geografi dalam kerangka *national attributes* merujuk pada letak wilayah, posisi strategis, kondisi topografi, serta aksesibilitas suatu negara terhadap jalur perdagangan, kawasan maritim, dan pusat-pusat ekonomi regional maupun global. Hudson dan Day menempatkan geografi sebagai faktor yang relatif tetap (*relatively enduring*) namun memiliki implikasi dinamis terhadap kebijakan luar negeri, karena kondisi geografis membentuk apa yang oleh Harold dan Margaret Sprout disebut sebagai *milieu*. *Milieu* merupakan lingkungan operasional negara atau ruang objektif tempat pengambil keputusan bertindak, yang sekaligus menciptakan peluang maupun keterbatasan dalam perumusan kebijakan. Posisi geografis yang strategis, misalnya berada pada jalur pelayaran internasional, berdekatan dengan pusat pertumbuhan ekonomi kawasan, atau memiliki wilayah yang kaya akan cadangan sumber daya alam tertentu, dapat meningkatkan daya tarik suatu negara sebagai destinasi investasi maupun mitra kerja sama ekonomi. Dalam konteks ini, letak geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang berada di jalur perdagangan maritim utama Asia Pasifik, serta memiliki sebaran cadangan nikel di kawasan-kawasan tertentu seperti Sulawesi dan Maluku Utara, turut membentuk pertimbangan strategis negara-negara mitra, termasuk Tiongkok, dalam menjajaki kerja sama investasi pada sektor hilirisasi nikel.

3. *Natural resources*

Sumber daya alam merupakan salah satu atribut nasional yang memengaruhi kapasitas dan orientasi kebijakan luar negeri suatu negara. Kepemilikan atas sumber daya alam strategis, baik dalam bentuk energi, mineral, maupun komoditas lainnya, memberikan negara posisi tawar tertentu dalam interaksi ekonomi internasional, sekaligus menciptakan ketergantungan timbal balik (*interdependensi*) dengan negara atau aktor lain yang membutuhkan akses terhadap sumber daya tersebut. Menurut Hudson dan Day, kelimpahan sumber daya alam dapat menjadi instrumen diplomasi ekonomi (*resource diplomacy*) sekaligus faktor yang membentuk pola kerja sama maupun ketergantungan struktural suatu negara terhadap mitra dagang atau investornya. Dalam konteks ini, keberadaan sumber daya alam tidak hanya dipandang sebagai aset ekonomi domestik, tetapi juga sebagai variabel yang membentuk kalkulasi kebijakan luar negeri, khususnya dalam menentukan negara atau aktor mana yang dipilih sebagai mitra strategis untuk mengelola dan mengoptimalkan nilai tambah dari sumber daya tersebut.

4. *Demographics*

Faktor demografi mencakup jumlah, struktur usia, tingkat pertumbuhan, serta persebaran penduduk suatu negara. Karakteristik demografis memengaruhi ketersediaan tenaga kerja, besaran pasar domestik, dan kapasitas produktif suatu negara, yang pada gilirannya turut menentukan daya tarik negara tersebut di mata investor maupun mitra kerja sama internasional. Struktur demografi yang produktif, misalnya

populasi usia kerja yang besar, dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi masuknya investasi asing yang berorientasi pada pemanfaatan tenaga kerja maupun luasnya pasar.

5. *Political system*

Sistem politik merujuk pada bentuk pemerintahan, struktur pengambilan keputusan, tingkat stabilitas politik, serta derajat akuntabilitas pemerintah terhadap publik. Rosenau, sebagaimana dirujuk oleh Hudson dan Day, menempatkan akuntabilitas politik (*political accountability*) sebagai salah satu variabel genotipe (*genotypic variable*) yang memengaruhi perilaku kebijakan luar negeri suatu negara. Sistem politik yang stabil dan memiliki kapasitas pengambilan keputusan yang terpusat cenderung mampu merumuskan serta mengeksekusi kebijakan luar negeri secara lebih konsisten, termasuk dalam hal keterbukaan terhadap investasi asing. Sebaliknya, sistem politik yang tidak stabil atau memiliki banyak *veto player* dapat memperlambat maupun mempersulit proses pengambilan keputusan strategis, termasuk keputusan untuk menjalin kerja sama investasi dengan negara lain.

6. *Economic capabilities*

Kapabilitas ekonomi mencakup kekuatan produk domestik bruto (PDB), tingkat industrialisasi, daya saing ekonomi, serta kapasitas fiskal suatu negara dalam membiayai pembangunan maupun menarik investasi. Kapabilitas ekonomi menentukan seberapa besar ruang gerak (*leverage*) yang dimiliki suatu negara dalam bernegosiasi dengan mitra

ekonomi internasional, sekaligus menjadi indikator daya tarik negara tersebut sebagai destinasi investasi. Negara dengan kapabilitas ekonomi yang terbatas untuk membiayai pembangunan sektor strategis secara mandiri, misalnya sektor hilirisasi industri, cenderung lebih terbuka terhadap masuknya investasi asing sebagai instrumen untuk mengakselerasi pembangunan ekonomi nasionalnya.

7. *Military capabilities*

Kapabilitas militer berkaitan dengan kekuatan pertahanan, anggaran militer, serta kapasitas suatu negara dalam menjaga keamanan nasional dan mendukung kepentingan strategisnya di kancah internasional. Meskipun kapabilitas militer lebih sering dikaitkan dengan isu keamanan tradisional (*hard power*), faktor ini juga dapat memengaruhi kalkulasi kebijakan luar negeri suatu negara dalam menjalin kerja sama ekonomi, khususnya ketika mitra kerja sama memiliki relevansi terhadap kepentingan strategis maupun keamanan nasional negara tersebut.

Tabel 1.2 Operasionalisasi Konsep

Atribut Nasional	Definisi Operasional	Indikator Empiris
<i>Size</i>	Karakteristik yang berkaitan dengan ukuran wilayah dan jumlah penduduk yang membentuk kapasitas serta posisi negara.	Luas wilayah, jumlah penduduk, dan skala pasar domestik.
<i>Geography</i>	Kondisi dan posisi geografis yang menciptakan peluang maupun keterbatasan dalam hubungan eksternal.	Letak strategis Indonesia, posisi jalur perdagangan, lokasi dan persebaran cadangan nikel, serta aksesibilitas.
<i>Natural Resource</i>	Kepemilikan sumber daya alam strategis yang menjadi aset ekonomi dan dasar hubungan dengan aktor eksternal.	Cadangan dan produksi nikel, nilai strategis nikel, kebutuhan terhadap nikel, serta posisi nikel dalam rantai pasok global.
<i>Demography</i>	Karakteristik penduduk yang memengaruhi kapasitas produktif dan ketersediaan tenaga kerja.	Penduduk usia produktif, ketersediaan tenaga kerja, dan kebutuhan tenaga kerja industri hilirisasi.
<i>Political System</i>	Struktur dan mekanisme politik yang memengaruhi proses pembentukan dan pelaksanaan kebijakan negara.	Struktur pengambilan keputusan, kapasitas pemerintah, regulasi investasi, kebijakan hilirisasi, dan instrumen insentif.
<i>Economic Capabilities</i>	Kapasitas ekonomi yang menentukan kemampuan negara memenuhi kebutuhan pembangunan secara mandiri.	Ketersediaan modal domestik, kemampuan teknologi, tingkat industrialisasi, kapasitas industri pengolahan, dan kebutuhan investasi asing.
<i>Military Capabilities</i>	Kapasitas pertahanan yang dapat memengaruhi kalkulasi strategis negara dalam hubungan eksternal.	Kapasitas pertahanan, anggaran militer, dan pertimbangan keamanan dalam hubungan dengan Tiongkok.

Sumber: Diolah oleh peneliti

Operasionalisasi tersebut menjadi dasar dalam proses analisis data penelitian. Ketujuh atribut digunakan sebagai kategori awal dalam *open coding* untuk mengidentifikasi informasi yang berkaitan dengan karakteristik nasional Indonesia. Selanjutnya, melalui *axial coding*, temuan yang memiliki keterkaitan dikelompokkan berdasarkan atribut nasional yang relevan untuk melihat atribut mana yang muncul, bagaimana perannya, dan tingkat relevansinya terhadap kebijakan Indonesia dalam menerima investasi Tiongkok. Dengan demikian, penelitian tidak mengasumsikan bahwa seluruh atribut nasional memiliki pengaruh,

tetapi menentukan relevansinya berdasarkan temuan empiris dalam dokumen yang dianalisis. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan *atribut nasional* sebagai *sumber penjelasan* dalam kerangka *analisis kebijakan luar negeri* Hudson dan Day untuk menjelaskan faktor atribut nasional yang memengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia dalam menerima investasi Tiongkok pada sektor hilirisasi nikel.

1.8 Metodologi Penelitian

Dalam memahami topik penelitian yang akan dikaji, maka diperlukan prosedur yang berfungsi untuk menganalisis fenomena dalam studi hubungan internasional. Prosedur dan proses ini dikenal sebagai sebuah metode penelitian.

1.8.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Metode penelitian kualitatif merupakan sebuah metode dimana data didapat melalui perilaku yang diamati dan berfokus pada sebab akibat terkhusus pada bagaimana data tersebut bisa muncul dan didapatkan. Data yang dihasilkan dalam penelitian ini merupakan suatu nilai di balik data yang tampak dan tidak menekankan pada generalisasi. Oleh karena itu, metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna untuk mendapatkan pemahaman yang baru.²⁸ Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis kualitatif – eksplanatif.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Edisi Kedua Cetakan Ke-5 (Alfabeta Bandung, 2023).

1.8.2 Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi penelitian agar penelitian dapat menjadi lebih fokus. Peneliti memberikan batasan penelitian yang dimulai dari tahun 2020 hingga 2024. Pemilihan tahun 2020 didasarkan pada titik awal efektifnya pemberlakuan pelarangan ekspor bijih nikel mentah secara penuh serta dimulainya akselerasi masif investasi Tiongkok dalam pembangunan fasilitas pengolahan (*smelter*) di Indonesia. Sementara itu, tahun 2024 ditetapkan sebagai batas akhir untuk mengevaluasi secara utuh faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia dalam menerima investasi tersebut selama satu periode penuh pemerintahan Presiden Joko Widodo, sebelum terjadinya transisi kepemimpinan nasional.

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Unit analisis merupakan sebuah objek yang perilakunya akan dianalisa atau dapat disebut sebagai variabel dependen. Sedangkan, unit eksplanasi merupakan objek yang memengaruhi perilaku unit analisis yang biasanya disebut variabel independen.²⁹ Maka dengan demikian, unit analisis dalam penelitian ini adalah faktor atribut nasional yang memengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia dalam menerima investasi Tiongkok pada sektor hilirisasi nikel, dengan unit eksplanasi yaitu kebijakan luar negeri Indonesia dalam menerima investasi Tiongkok.

Level analisis merupakan landasan yang menunjukkan cakupan berpikir mengenai tingkatan masalah didalam penelitian. Dalam studi hubungan internasional secara umum terdapat tiga cakupan perspektif yang dapat digunakan

²⁹ Mohtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Edisi Ke-2 (Penerbit PT Pustaka LP3ES Jakarta, 1990).

dalam tingkat analisis yaitu sistem internasional, negara, dan individu.³⁰ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan level negara (*state level of analysis*) khususnya melalui pendekatan *the levels of national attributes* dalam kerangka *Foreign Policy Analysis* (FPA) Valerie M. Hudson dan Benjamin S. Day³¹ untuk menjelaskan faktor atribut nasional yang memengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia dalam menerima investasi Tiongkok pada sektor hilirisasi nikel.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam sebuah penelitian merupakan langkah penting dalam proses penelitian karena dalam proses ini peneliti akan memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan untuk menganalisis dan menjawab pertanyaan penelitian.³² Teknik pengumpulan data dipergunakan untuk mendapatkan data akurat dan relevan sesuai dengan tujuan penelitian. Pada penelitian ini, pengumpulan data difokuskan pada metode analisis dokumentasi dan studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini digunakan untuk menghimpun, menyaring, mengorganisir, serta mengkategorisasikan data secara sistematis dari berbagai sumber tertulis, baik berupa dokumen resmi pemerintah, regulasi, laporan lembaga, buku, jurnal ilmiah, maupun artikel berita kredibel, guna mempermudah proses pengkodean (*coding*) dalam analisis data selanjutnya.

Jika dilihat dari sumbernya, data dapat dikumpulkan melalui dua penggunaan sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.³³

³⁰ Mohtar Mas'oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*.

³¹ Hudson and Day, *Foreign Policy Analysis*.

³² Tedi Priatna et al., "Teknik Pengumpulan Data Dalam Pendekatan Kualitatif," *Merdeka Indonesia Journal International (MIJI)* Vol. 5 No. 2 (Desember 2025).

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Cetakan ke-19 (Alfabeta Bandung, 2013).

Dalam pengumpulan data primer, peneliti menghimpun dokumen resmi pemerintah dan produk perundang-undangan, di antaranya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 beserta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019, laporan realisasi investasi dari Kementerian Investasi/BKPM (<https://www.bkpm.go.id/>), serta data Badan Pusat Statistik (BPS) periode 2020–2024 (<https://www.bps.go.id/>). Selain itu, peneliti juga menelusuri transkrip pernyataan resmi pejabat publik yang dipublikasikan melalui situs resmi pemerintahan, seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (<https://www.esdm.go.id/>) dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (<https://kemlu.go.id/>), guna melihat informasi resmi terkait arah kebijakan hilirisasi serta alasan pemerintah dalam menerima investasi Tiongkok.

Sementara itu, dalam pengumpulan data sekunder, data dicari pada laman Google Scholar dengan penggunaan kata kunci "*nickel downstreaming*" AND "*China investment*" AND "*Indonesia foreign policy*", seperti yang ditekankan oleh salah satu ahli bernama John W. Creswell yang mengatakan bahwa penting untuk menggunakan kata kunci yang efektif dalam pencarian literatur. Dalam sebuah diskusi tentang metodologi pencarian literatur, Creswell menyoroti pentingnya mengidentifikasi kata kunci untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencarian literatur.³⁴ Data yang digunakan juga berasal dari media massa atau media berita untuk melihat sisi pandang yang lebih dekat dengan dinamika kebijakan dan opini publik, menggunakan sumber dari Reuters (<https://www.reuters.com/>), Bloomberg (<https://www.bloomberg.com/>), CNBC Indonesia (<https://www.cnbcindonesia.com/>), Antara News

³⁴ John W. Creswell and J. David Creswell, *Research Design, Writing Center Talk over Time*, 2018, doi:10.4324/9780429469237-3.

(<https://www.antaranews.com/>), Tempo (<https://www.tempo.co/>), serta beberapa media terkait lainnya baik itu media internasional maupun media nasional Indonesia. Seluruh data mentah yang telah dihimpun dari sumber primer dan sekunder tersebut kemudian disortir, disaring, serta disistematisasi untuk mendukung proses pengkodean (*coding*) dalam analisis data selanjutnya menggunakan kerangka *Foreign Policy Analysis*.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan rangkaian proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil dokumentasi. Pada penelitian ini, peneliti menerapkan teknik analisis data kualitatif. Aktivitas ini dijabarkan melalui tiga bentuk alur kerja Miles, Huberman, dan Saldaña, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*).³⁵ Metode sistematis ini memungkinkan analisis yang komprehensif terhadap data kualitatif yang dikumpulkan melalui analisis dokumen mengenai investasi Tiongkok pada sektor hilirisasi nikel di Indonesia, guna menjawab pertanyaan penelitian mengenai faktor atribut nasional yang memengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia dalam menerima investasi tersebut, dengan menggunakan kerangka analisis kebijakan luar negeri (*Foreign Policy Analysis/FPA*).

1. Reduksi data adalah proses seleksi, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah yang terkumpul selama penelitian. Proses ini sangat penting untuk mengelola kompleksitas data kualitatif dan

³⁵ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, Third Edition (Library of Congress Cataloging-in-Publication Data: SAGE Publications, 2013).

memastikan bahwa data yang disaring tetap relevan dengan pertanyaan penelitian. Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan memfokuskan data pada dokumen resmi pemerintah, laporan realisasi investasi BKPM, serta regulasi terkait periode 2020–2024. Data yang dipilih adalah data yang secara langsung menjelaskan justifikasi pemerintah dalam menerima investasi Tiongkok di tengah tuntutan hilirisasi, sehingga diperoleh 23 dokumen sumber yang relevan untuk dianalisis lebih lanjut.

2. Selanjutnya, peneliti melakukan analisis mendalam dengan menggunakan teknik *coding*. Pada tahap *open coding*, peneliti membaca setiap dokumen secara baris demi baris (*line-by-line*) untuk mengidentifikasi konsep atau pernyataan kunci, kemudian memberi label awal (kode terbuka) tanpa terikat kategori tertentu. Misalnya, dari laporan realisasi investasi BKPM tahun 2022 yang menyebutkan bahwa investor Tiongkok mendominasi pembangunan *smelter* di Sulawesi Tengah karena kesiapan teknologi *rotary kiln-electric furnace* (RKEF), peneliti memberi kode terbuka seperti "keunggulan teknologi RKEF" dan "kesiapan investasi cepat". Dari dokumen regulasi Kementerian ESDM mengenai insentif fiskal kawasan industri, muncul kode seperti "insentif *tax holiday*" dan "kemudahan perizinan". Proses ini menghasilkan puluhan kode terbuka yang tersebar dari 23 dokumen sumber yang telah direduksi sebelumnya.
3. Tahap selanjutnya adalah *axial coding*, yaitu proses mengelompokkan dan menghubungkan kode-kode terbuka yang dihasilkan satu sama lain

berdasarkan tujuh atribut nasional dalam kerangka FPA Hudson dan Day. Sebagai contoh, kode "keunggulan teknologi RKEF" dan "kesiapan investasi cepat" dikategorikan ke dalam atribut *economic capabilities*, karena mencerminkan kesenjangan kapasitas modal dan teknologi domestik. Kode "insentif *tax holiday*" dan "kemudahan perizinan" dikategorikan ke dalam atribut *political system*, karena mencerminkan saluran regulasi pemerintah. Sementara itu, kode seperti "cadangan bijih nikel Sulawesi" dan "kadar nikel laterit" dikategorikan ke dalam atribut *natural resources*. Dokumen yang memuat lebih dari satu indikator diklasifikasikan ke dalam kategori yang lebih kompleks sesuai konteks kebijakan yang dibahas. Proses ini menghasilkan pemetaan yang menjelaskan bagaimana masing-masing atribut nasional berkontribusi terhadap kebijakan penerimaan investasi Tiongkok pada sektor hilirisasi nikel.

4. Data yang telah melalui tahap *open coding* dan *axial coding* kemudian disajikan dalam bentuk tabel yang merangkum kategori atribut nasional, kode terkait, serta dokumen sumber pendukungnya. Penyajian data ini dilakukan dengan menggunakan mekanisme dan kerangka pemikiran kerangka FPA Hudson dan Day yang mencakup tujuh atribut nasional, meliputi *economic capabilities*, *political system*, *natural resources*, dan atribut lainnya yang relevan. Dengan melakukan metode *open coding* dan *axial coding*, penyajian data dalam penelitian ini akan menjelaskan bagaimana masing-masing atribut nasional memengaruhi arah

kebijakan pemerintah Indonesia dalam menerima investasi Tiongkok pada sektor hilirisasi nikel.

5. Penarikan kesimpulan melibatkan interpretasi data yang telah dianalisis untuk merumuskan wawasan dan memverifikasi hasil temuan dengan data asli. Hasil dari koding dihubungkan satu sama lain untuk melihat pola keterkaitan antar variabel, kemudian dikorelasikan dengan pembahasan pada bab II dan bab III untuk menarik kesimpulan yang dapat menjawab pertanyaan penelitian. Tahapan ini memastikan bahwa kesimpulan yang diambil berdasar pada bukti empiris, sehingga dapat menghasilkan kesimpulan mengenai faktor atribut nasional yang memengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia dalam menerima investasi dari Tiongkok pada sektor hilirisasi nikel. Dengan menerapkan teknik analisis data kualitatif menurut Miles, Huberman, dan Saldaña, pendekatan ini memberikan kerangka yang sistematis untuk mengelola dan menafsirkan data kualitatif yang diperoleh dalam penelitian ini, sambil memastikan bahwa hasil yang diperoleh didasarkan pada bukti yang nyata dan diverifikasi secara teliti sepanjang proses analisis.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab pertama dalam penelitian ini yang berisi latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka konseptual, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM MENERIMA INVESTASI ASING PADA HILIRISASI NIKEL

Bab ini menguraikan hilirisasi nikel sebagai strategi kepentingan nasional Indonesia, meliputi pergeseran paradigma dari eksportir bahan mentah menjadi negara industri dan kaitannya dengan *economic nationalism*; posisi nikel Indonesia dalam politik ekonomi global, termasuk relevansinya sebagai mineral kritis dalam rantai pasok kendaraan listrik dan kompetisi industri baterai; kesenjangan kapabilitas domestik dari segi teknologi *High Pressure Acid Leaching* (HPAL), modal, pengalaman industri, dan infrastruktur; kapasitas kelembagaan pemerintah dan instrumen kebijakan investasi, mencakup peran Presiden, Kementerian Investasi, Kemenko Marves, dan Kementerian ESDM; serta kebijakan luar negeri Indonesia dalam membangun kerja sama investasi dengan Tiongkok melalui skema *Belt and Road Initiative* (BRI), hubungan bilateral, *strategic partnership*, dan *economic diplomacy*. Bab ini berfungsi memberikan konteks kebijakan sebagai landasan bagi pembahasan pada bab-bab selanjutnya.

BAB III: DOMINASI INVESTASI TIONGKOK DALAM PENGEMBANGAN HILIRISASI NIKEL INDONESIA

Bab ini menguraikan perkembangan dan dominasi investasi Tiongkok dalam hilirisasi nikel Indonesia periode 2020–2024, mencakup nilai investasi, jumlah proyek, kawasan industri, dan perusahaan utama yang terlibat; peran investasi Tiongkok dalam

pembentukan ekosistem industri hilirisasi nikel, meliputi pembangunan smelter, kawasan industri (seperti IMIP, IWIP, Pomalaa, dan Morowali), teknologi pengolahan, serta keterkaitannya dengan rantai pasok baterai kendaraan listrik; dan posisi strategis investasi Tiongkok dibandingkan mitra alternatif lainnya, yang dianalisis melalui perspektif hubungan ketergantungan yang tidak sepenuhnya seimbang (*asymmetric interdependence*) antara kebutuhan Indonesia atas modal dan teknologi dengan kebutuhan Tiongkok atas akses sumber daya nikel. Data dan analisis pada bab ini menjadi jembatan empiris menuju pembahasan faktor *economic capabilities* pada Bab IV.

BAB IV: ANALISIS FAKTOR ATRIBUT NASIONAL YANG MEMENGARUHI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA MENERIMA INVESTASI TIONGKOK PADA SEKTOR HILIRISASI NIKEL

Bab ini merupakan bab analisis yang mengintegrasikan data empiris dari bab II dan bab III dengan kerangka konseptual yang telah dibangun. Peneliti akan membedah faktor atribut nasional yang memengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia dalam menerima investasi Tiongkok, guna menjawab pertanyaan penelitian mengenai faktor yang mendasari pengambilan kebijakan tersebut.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran atas penelitian yang telah dilakukan yang menjawab pertanyaan penelitian.